

BAB I

PENDAHULUAN

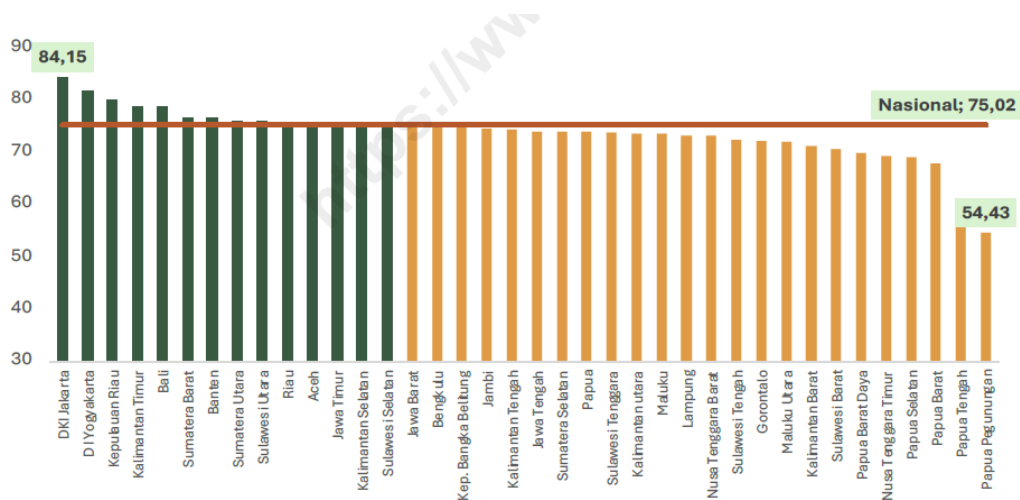
1.1.Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik, maupun budaya (Badan Pusat Statistik, 2025). Pembangunan tidak hanya diartikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup manusia melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, pendapatan, serta pemerataan kesempatan. Konsep pembangunan modern menekankan pendekatan *human development* yang dipopulerkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), yang mengukur keberhasilan pembangunan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM merupakan ukuran komprehensif yang mencerminkan kualitas hidup penduduk suatu wilayah melalui indikator pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita (UNDP, 2025).

UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan yang diwakili oleh pengeluaran riil per kapita (Ningsih and Kara, 2023). Ketiga indikator tersebut belum sepenuhnya berfungsi optimal di Indonesia. Dimensi kesehatan, yang diukur melalui indikator umur panjang dan hidup sehat, mengalami perlambatan pada tahun 2021. Dimensi pendidikan, yang diwakili oleh lama sekolah rata-rata dan lama sekolah yang diharapkan, meningkat, namun lama sekolah rata-rata melambat

dalam beberapa tahun terakhir. Data BPS tahun 2021 menunjukkan bahwa indikator lama sekolah rata-rata tumbuh melambat dari 2018 hingga 2020 sebesar 0,08% poin. Dimensi pendapatan, yang diukur melalui pengeluaran riil per kapita, turun pada tahun 2020 menjadi Rp 11.013.000 per tahun dan meningkat sedikit pada tahun 2021 menjadi Rp 11.156.000 per tahun. Aspek pengembangan sumber daya manusia berkualitas di Indonesia memerlukan perhatian lebih intensif agar kualitas SDM meningkat. Manusia menjadi aset utama bangsa, berperan sebagai pelaku pembangunan sekaligus menjadi tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia (Tazliqoh, 2022).

Pengukuran kemajuan pembangunan manusia di Indonesia menghasilkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019–2024, yang digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia pada berbagai aspek fundamental. Berikut ini adalah capaian IPM di Indonesia tahun 2024:



Gambar 1. 1 IPM Wilayah-Wilayah di Indonesia, 2024

Berdasarkan gambar di atas. Pemerintah menargetkan IPM mencapai 75,54 pada tahun 2024 sebagai bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. IPM Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebesar 75,02, termasuk dalam kategori tinggi. Pertumbuhan IPM pada periode 2020–2024 mencatat angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yakni 0,85 persen. Rata-rata pertumbuhan IPM selama periode tersebut sekitar 0,75% per tahun. Peningkatan signifikan IPM pada 2024 sebagian didorong oleh dimensi standar hidup layak, yang tercermin dari pertumbuhan pengeluaran riil per kapita sebesar 3,71% dibanding tahun 2023. Dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2025).

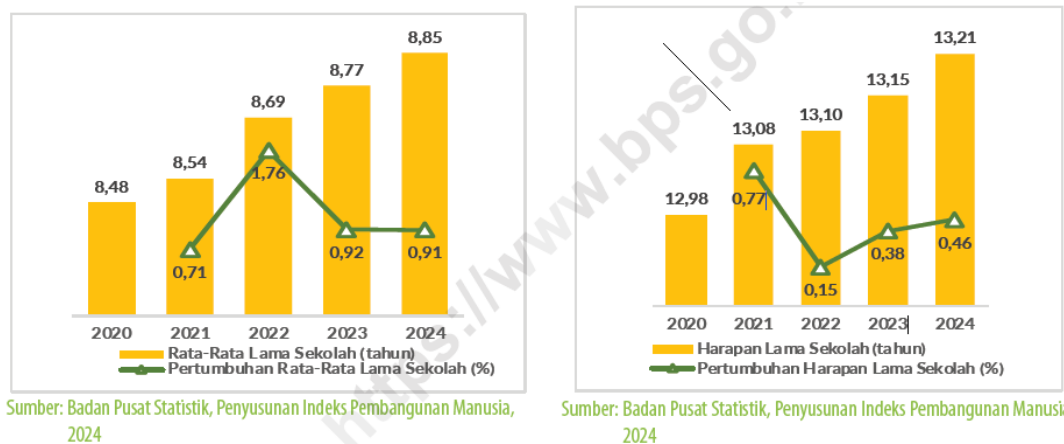
Pembangunan manusia di Jawa Timur terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2021, status pembangunan manusia Jawa Timur sudah berada di level “tinggi”. Selama 2016-2025, IPM Jawa Timur rata-rata meningkat sebesar 0,89 persen per tahun, dari 73,48 pada tahun 2021 menjadi 76,13 pada tahun 2025. Kabupaten Jombang menunjukkan peningkatan pada seluruh indikator pembangunan manusia selama periode 2023–2025. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 74,43 tahun pada 2023 menjadi 74,64 tahun pada 2024 dan 74,96 tahun pada 2025. Harapan Lama Sekolah (HLS) juga mengalami kenaikan dari 13,59 tahun pada 2023 menjadi 13,61 tahun pada 2024 dan 13,62 tahun pada 2025. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat dari 8,77 tahun pada 2023 menjadi 8,78 tahun pada 2024 dan 8,88 tahun pada 2025. Data tersebut menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten pada aspek kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Jombang dalam tiga tahun terakhir (BPS Jawa Timur, 2025).

Beberapa faktor memengaruhi IPM di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang tinggi di suatu wilayah dapat meningkatkan tekanan terhadap sumber daya. Tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi menunjukkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Tingkat pendidikan yang rendah dan kesehatan masyarakat yang kurang optimal turut memengaruhi kemiskinan. Selain itu, tingkat pengangguran, distribusi pendapatan yang tidak merata, kesempatan kerja, inflasi, bencana alam, jenis pendidikan, investasi, ketersediaan fasilitas umum, upah neto, pajak, subsidi, dan penggunaan teknologi menjadi faktor tambahan yang memengaruhi kondisi ekonomi dan kemiskinan suatu wilayah (Amrullah, 2022).

Pemerintah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas manusia melalui alokasi pengeluaran pada tiga jenis belanja, yaitu belanja pendidikan, belanja kesehatan, dan belanja infrastruktur. Belanja sektor pendidikan memegang peran penting dalam mencetak sumber daya manusia dan mendukung pembangunan manusia secara menyeluruh. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan untuk memperluas kesempatan penduduk mencapai kehidupan yang layak. Alokasi belanja pemerintah di belanja sektor pendidikan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Habib *et al.*, 2025).

Dimensi pengetahuan diukur melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, terutama pendidikan formal. HLS menunjukkan kesempatan masyarakat menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS mencerminkan stok modal manusia di suatu wilayah. Penghitungan

kedua indikator menggunakan data dari SUSENAS bulan Maret. Pengukuran HLS memanfaatkan faktor koreksi berupa data jumlah siswa yang menempuh pendidikan dengan tinggal di asrama dari Kementerian Agama, serta hasil inventarisasi data sektoral di kabupaten/kota. Faktor koreksi ini memastikan HLS mencakup seluruh peserta didik, termasuk yang tidak tercatat dalam SUSENAS (Badan Pusat Statistik, 2025). Berikut ini adalah capaian sector pendidikan di Indonesia:



Gambar 1. 2 Capaian dan Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 8,85 tahun, yang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk berusia 25 tahun ke atas menempuh pendidikan hingga jenjang SMP kelas VIII. RLS meningkat 0,08 tahun atau sebesar 0,91% dibandingkan tahun sebelumnya. Harapan Lama Sekolah (HLS) pada 2024 mencapai 13,21 tahun, yang berarti anak berusia 7 tahun diperkirakan dapat menempuh pendidikan selama 13,21 tahun hingga jenjang perguruan tinggi tahun pertama. HLS naik 0,06 tahun atau sebesar 0,46% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan RLS dan HLS didukung oleh pertumbuhan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Data indikator pendidikan 2020–2024 menunjukkan akses pendidikan dasar di Indonesia sudah merata, tercermin dari APS usia 7–12 tahun yang stabil di atas 99% dan APM SD yang mendekati 98%. Partisipasi pendidikan tingkat SMP (usia 13–15 tahun) juga tinggi, dengan APS di atas 95% dan APM SMP yang meningkat dari 80,12% menjadi 81,73%. Tantangan terlihat pada pendidikan menengah atas (usia 16–18 tahun). APS meningkat dari 72,72% menjadi 74,64%, namun tetap lebih rendah dibanding kelompok usia lain, sedangkan APM SMA naik dari 61,25% menjadi 64,32%, tetap rendah. Kondisi ini menunjukkan hambatan dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi akibat faktor ekonomi, geografis, dan sosial.

Indikator Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
APS Usia 7–12 Tahun	99,26	99,19	99,10	99,16	99,19
APS Usia 13–15 Tahun	95,74	95,99	95,92	96,10	96,17
APS Usia 16–18 Tahun	72,72	73,09	73,15	73,42	74,64
APM SD	97,69	97,80	97,88	97,89	97,94
APM SMP	80,12	80,59	80,89	81,35	81,73
APM SMA	61,25	61,65	61,97	62,53	64,32

Gambar 1. 3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Indonesia, 2020–2024

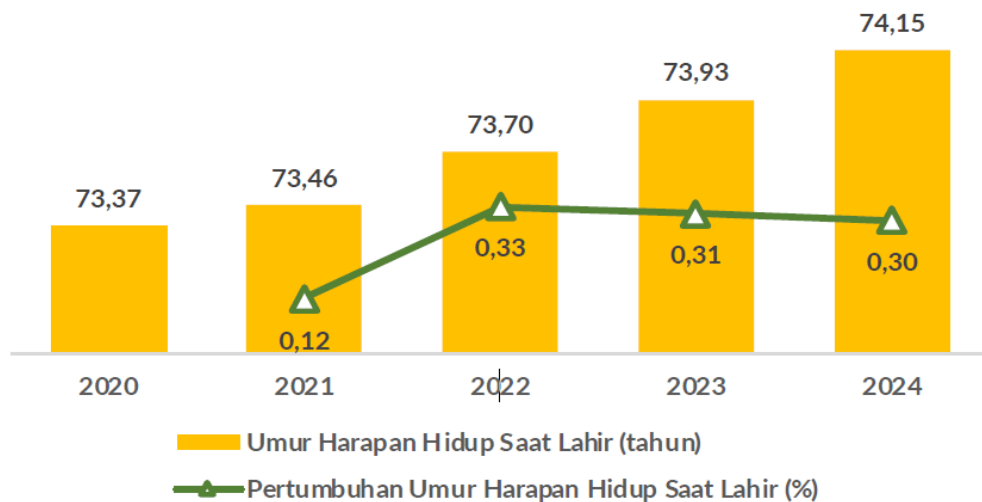
Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Penelitian Sari *et al* (2025) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di belanja sektor pendidikan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa peningkatan belanja pendidikan terkait dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ramadanisa dan Triwahyuningtyas (2022) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah belanja sektor pendidikan berpengaruh positif

terhadap IPM dalam konteks SDGs. Setiap peningkatan belanja sektor pendidikan meningkatkan IPM, yang berarti pendidikan berdampak positif pada pencapaian pembangunan manusia.

Penelitian Darmawan, Rochaida dan Awaluddin (2023) mendapatkan hasil yang sebaliknya karena menyatakan bahwa belanja pemerintah pada pendidikan memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM. Penelitian lain oleh Wafitrah, Dwiana dan Saudi (2023) menemukan bahwa belanja pemerintah untuk pendidikan tidak memiliki pengaruh langsung terhadap IPM, sedangkan belanja pada sektor lain (misalnya kesehatan, investasi) menunjukkan hubungan yang berbeda.

Indikator kesehatan menunjukkan pola fluktuatif. Ketidakstabilan anggaran pada belanja sektor kesehatan dapat memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Daerah yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat berisiko mengalami penurunan kualitas hidup masyarakat. Kemandirian fiskal daerah juga memengaruhi IPM. Kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan sendiri. Daerah dengan kemandirian fiskal rendah masih bergantung pada pemerintah pusat dan belum mampu mengelola keuangan secara optimal. Banyak daerah memiliki kemandirian fiskal yang rendah, sehingga faktor ini menarik untuk dianalisis lebih lanjut (Nurvita *et al.*, 2022). Berikut ini adalah capaian dan pertumbuhan usia harapan hidup saat lahir di Indonesia:



Gambar 1. 4 Capaian dan Pertumbuhan Umur Harapan Hidup saat Lahir Indonesia, 2020–2024

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Dimensi umur panjang dan hidup sehat menjadi salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Peningkatan UHH mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik sehingga usia harapan hidup meningkat. UHH Indonesia pada tahun 2024 tercatat 74,15 tahun, yang berarti anak yang lahir pada tahun tersebut diperkirakan dapat hidup hingga 74,15 tahun. UHH naik 0,22 tahun atau sebesar 0,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan rata-rata pertumbuhan 0,26 persen per tahun selama periode 2020–2024.

Peningkatan UHH pada 2024 disertai dengan indikator kesehatan lain, seperti persentase persalinan yang ditolong tenaga kesehatan dan persentase balita yang menerima imunisasi dasar. Meski demikian, tingkat keluhan kesehatan juga meningkat. Kenaikan ini diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk yang melakukan berobat jalan maupun rawat inap. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perbaikan sistem kesehatan, peningkatan akses layanan, dan langkah-

langkah preventif agar seluruh penduduk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai. Indikator kesehatan Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Indikator Kesehatan	2023	2024
(1)	(2)	(3)
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan sebulan yang lalu	26,27	27,34
Persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga medis)	95,69	96,81
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi BCG	88,90	90,55
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi DPT	84,68	85,88
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi Polio	85,94	90,37
Persentase Balita yang pernah mendapat imunisasi Campak	69,92	72,45
Persentase penduduk yang berobat jalan sebulan yang lalu	35,16	38,70
Persentase penduduk yang rawat inap setahun terakhir	3,29	3,74

Gambar 1. 5 Indikator Kesehatan Indonesia, 2023 dan 2024

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2025)

Penelitian Faqhruddin, Rabb dan Andriani (2025) menemukan bahwa pengeluaran untuk belanja sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Human Development Index* (IPM), artinya alokasi belanja kesehatan dapat mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia. Penelitian ini didukung oleh Nainggolan (2024) menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada belanja sektor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, menandakan investasi pada layanan kesehatan mampu meningkatkan pembangunan manusia.

Hasil bertentangan didapatkan oleh Sijabat (2022) di 34 provinsi Indonesia menunjukkan bahwa belanja belanja sektor kesehatan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan IPM, meskipun belanja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh. Hasil penelitian Setiawan *et al* (2024) yang menunjukkan bahwa pengeluaran langsung belanja sektor kesehatan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM. Pemerintah mengalokasikan dana untuk

layanan kesehatan, hal ini tidak secara langsung meningkatkan kualitas pembangunan manusia sebagaimana tercermin dari IPM di wilayah tersebut.

Indikator ekonomi tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di berbagai daerah juga mengalami perkembangan yang relatif stabil. Namun demikian, tantangan pembangunan masih dihadapi, seperti ketimpangan antarwilayah, kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan di beberapa daerah, serta disparitas pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan (Ahmat *et al.*, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Indonesia masih memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tercapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2025).

Hasil penelitian Gultom *et al* (2025) menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, yang berarti peningkatan ekonomi daerah berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan *Gross Regional Domestic Product* mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penelitian lain Williyen dan Hasmarini (2024) menemukan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan nilai PDRB per kapita meningkatkan kemampuan wilayah dalam meningkatkan standar kualitas hidup manusia.

Hasil penelitian bertentangan dilakukan oleh Andini dan Pratama (2025) di sejumlah provinsi Indonesia menemukan bahwa PDRB per kapita tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPM, karena pertumbuhan ekonomi belum secara

langsung diterjemahkan ke peningkatan kualitas hidup penduduk di semua wilayah akibat tantangan konsumsi dan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Ekonomi regional (PDRB per kapita) tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM karena pertumbuhan ekonomi belum otomatis meningkatkan dimensi pembangunan manusia secara merata, sehingga kenaikan PDRB tidak langsung berdampak kuat pada indikator pembangunan manusia.

Ketimpangan capaian pembangunan manusia antarwilayah di belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masih menjadi tantangan utama bagi pembangunan manusia secara nasional. Capaian pembangunan manusia Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun kesenjangan antarwilayah tetap cukup lebar. Infrastruktur yang memadai dan terdistribusi merata menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Kondisi jalan yang baik, akses internet, listrik, dan fasilitas kesehatan yang tersedia di seluruh wilayah Indonesia meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas (Badan Pusat Statistik, 2025).

Banyak penelitian telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait pengaruh belanja sektor pendidikan, belanja sektor kesehatan, dan PDRB terhadap IPM. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM, di mana peningkatan akses pendidikan, kualitas layanan kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi daerah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Namun, penelitian lain menemukan bahwa tidak semua variabel tersebut berpengaruh signifikan, terutama PDRB, yang dalam beberapa kasus tidak menunjukkan kontribusi

langsung terhadap IPM meskipun mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kondisi ini menimbulkan gap penelitian yang menekankan perlunya kajian empiris lebih lanjut untuk memahami hubungan kompleks antara ketiga sektor tersebut dan IPM, khususnya pada konteks daerah dengan karakteristik ekonomi, sosial, dan akses layanan yang berbeda-beda. Gap ini menjadi penting untuk menyesuaikan kebijakan pembangunan manusia yang lebih efektif di tingkat kabupaten atau provinsi : Analisis Pengaruh Belanja sektor pendidikan, Belanja sektor kesehatan Dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Jombang.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang akan diteliti ialah:

1. Apakah belanja sektor pendidikan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang?
2. Apakah belanja sektor kesehatan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang?
3. Apakah sektor PDRB berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui belanja sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang.

2. Untuk mengetahui belanja sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui PDRB terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Jombang.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini mempunyai tiga Manfaat penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat akademis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait pembangunan manusia dan ekonomi regional, dengan memperkaya bukti empiris mengenai pengaruh belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan PDRB terhadap IPM serta menegaskan bahwa pembangunan manusia dipengaruhi tidak hanya oleh pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kualitas layanan dasar masyarakat.

1.4.2. Manfaat kebijakan

Penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang terintegrasi antara peningkatan belanja sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia secara efektif dan berkelanjutan.

1.4.3. Manfaat operasional

Sebagai pedoman praktis bagi pemerintah daerah dan instansi terkait dalam menyusun perencanaan, penganggaran, serta evaluasi program di belanja sektor pendidikan dan kesehatan dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap

peningkatan PDRB dan Indeks Pembangunan Manusia, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan berbasis data.